

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat yang didasarkan prinsip bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan. Maksudnya adalah rakyat memegang kekuasaan paling tinggi dalam negara tersebut sehingga mereka berhak terlibat dalam segala aktivitas politik. Salah satu perwujudan dari hal ini dilaksanakan melalui proses pemilihan umum atau pemilu untuk mencari sosok pemimpin bagi negara tersebut. Selain itu, pemilu juga dapat menjadi tempat bagi rakyat untuk turut serta dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan maupun sistem-sistem pemerintahan yang berlaku, dengan berkesempatan untuk memutuskan wakilnya di berbagai lembaga-lembaga negara, seperti lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.¹

Pelaksanaan pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh komisi pemungutan suara bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU), seperti yang tertulis dalam Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada umumnya kegiatan ini diselenggarakan dalam jangka waktu 5 tahun sekali. Pemilu, dalam prosesnya sendiri berpegang pada 6 asas yaitu langsung,

¹ Arif Ikhwan, *“Perilaku Memilih Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Tanah Datar”*, skripsi, 2016, hlm. 1.

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Parameter demokrasi dalam sistem perekrutan pejabat politik dapat dicapai dengan menerapkan asas-asas ini.²

Pada 17 April 2020, negara Indonesia menyelenggarakan “pesta demokrasi” melalui pemilihan umum yang tujuan utamanya adalah untuk memilih presiden dan wakil presiden serta badan legislatif periode selanjutnya. Pelaksanaan pemilu tersebut menjadi bukti nyata Indonesia merupakan negara demokrasi. Penyelenggaraan pemilihan umum dapat dikatakan sebagai salah satu indikator keberhasilan atau sebagai tolak ukur kesuksesan negara demokrasi. Hal ini dikarenakan dalam prosesnya seluruh masyarakat dengan kriteria yang telah terpenuhi, ikut serta untuk memberikan partisipasinya secara langsung dalam pengambilan keputusan dan penentuan seorang pemimpin.³ Oleh karena itu, pemilu dianggap sebagai kegiatan yang berperan besar terhadap suatu negara.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, warga negara sebagai pemilih merupakan penentu atau dapat dikatakan mengambil bagian penting dalam pemilu. Pengertian dari pemilih sendiri telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 1 ayat 34 yang menyebutkan bahwa pemilih adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.⁴ Di antara para pemilih dalam pemilu yang

² Moch. Rico Fiki Effendi, “Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Perilaku Pemilih Pemula pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2015 (Studi pada Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya)”, skripsi, 2017, hlm. 2.

³ Fitra Endi Fernanda, “Persepsi Pemilih Pemula terhadap Pilkada Serentak di Desa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016”, skripsi, 2016, hlm. 2.

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

diselenggarakan tersebut terdapat pemilih pemula yang ikut terdaftar sebagai pemilih. Maksud dari pemilih pemula ini yaitu mereka yang menyumbangkan suaranya dalam pemilihan umum untuk pertama kali dengan rentang usia 17-21 tahun, serta mereka yang merupakan pensiunan anggota TNI/Polri.

Para pemilih pemula ini juga merupakan pemilih yang menjadi sasaran politik elit-elit politik. Berbagai program biasanya mereka buat dalam waktu mendekati pemilu dengan tujuan untuk menjaring atau memikat para pemilih pemula. Pembangunan komunitas-komunitas dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu mereka lakukan untuk mendapatkan dukungan dan suara untuk memenangkan pemilu dari para pemilih pemula tersebut, karena satu suara sangat memengaruhi kemenangan politik dalam pemilu.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis KPU, jumlah pemilih di Indonesia dalam pemilu 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pemilih dalam Pemilu Tahun 2019

Kategori	Jumlah Pemilih	Persentase
Pemilih Dalam Negeri	190.770.329	98.93%
Pemilih Luar Negeri	2.058.191	1.07%
Total	192.828.520	100%

Sumber : Website Resmi KPU

Dari total keseluruhan 192.828.520 pemilih, di antaranya tercatat terdapat 5.035.887 orang pemilih pemula.⁵ Ini berarti terdapat 2.6% pemilih pemula dari jumlah keseluruhan pemilih yang tercatat. Sedangkan untuk di Kabupaten Rembang sendiri, peneliti memperoleh data berikut :

⁵ Website Resmi KPU (infopemilu.kpu.go.id diakses pada tanggal 8 Mei 2019 pukul 19.20).

Tabel 1.2
Jumlah Pemilih Pemula dalam Pemilu Tahun 2019
di Kabupaten Rembang

Kategori	Laki-Laki	Perempuan	Total
Jumlah	11.333	10.654	21.992

Sumber : m.detik.com

Dari data tersebut tercatat terdapat 21.992 pemilih pemula dari total 482.708 pemilih yang tercatat di Kabupaten Rembang. Ini berarti terdapat 4.6% pemilih pemula dari jumlah keseluruhan pemilih. Angka ini tidak dapat dipungkiri juga sangat berpengaruh terhadap hasil pemilu.

Namun demikian, karena baru memasuki usia hak pilihnya, jangkauan politik para pemilih pemula masih sempit sehingga mereka masih kesulitan untuk memutuskan arah pilihan mereka. Dalam beberapa kasus, hal ini menyebabkan siapa yang mereka pilih dalam pemilu tidak seperti yang mereka harapkan, atau dapat juga dikatakan tidak sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Alasan inilah yang terkadang membuat para pemilih pemula lebih mudah terpengaruh melalui berbagai pendekatan oleh partai-partai politik maupun kandidat tertentu terutama dengan menggunakan pendekatan materi politik. Politik praktis yang masih awam dalam kehidupan mereka, ditambah lagi dengan banyaknya pilihan dalam pemilu, seringkali menjadikan pikiran pemilih pemula menjadi tidak rasional dan pada akhirnya kepentingan jangka pendeklah yang menjadi dasar pilihan mereka. Parpol atau calon tertentu bahkan berusaha memenangkan pemilihan tanpa memberikan pencerdasan dalam hal politik dan hanya menempatkan pemilih pemula sebagai objek politik. Pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran

dalam memilih pada pemilu yang minim inilah yang membuat pemilih pemula memiliki potensi besar untuk bertindak apatis.⁶

Saat ini pendidikan maupun sosialisasi politik tengah gencar diberikan kepada anak-anak sekolah terutama setelah mereka memasuki jenjang pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) yang bertujuan guna memberi pemahaman yang baik dan benar mengenai politik dan meningkatkan minat demokrasi pada anak. Memberikan pemahaman politik yang baik dan benar kepada para pemilih pemula, khususnya dalam hal pemilu ini amat penting untuk dilakukan. Pemberian kesan pertama yang positif harus diberikan oleh pemerintah, bersama dengan pihak lainnya pada pemilih pemula, mereka harus diyakinkan bahwa suaranya sangatlah penting karena mampu menaikkan kesejahteraan hidup bangsa dan memiliki peranan penting untuk menentukan nasib pemerintahan berikutnya. Pemberian pemahaman yang positif ini diharapkan dapat memotivasi mereka untuk terus menjadi pemilih yang cerdas.⁷ Namun demikian, saat ini di Indonesia masih terdapat banyak anak yang mengalami putus sekolah, baik di tingkat SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), maupun SMA (Sekolah Menengah Atas). Anak-anak yang mengalami putus sekolah sebelum memasuki jenjang pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) inilah yang kemudian tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan maupun sosialisasi politik yang menyebabkan mereka tidak begitu mengerti mengenai hal

⁶ Agung Putra Perdana dan Ishak, "Perilaku Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Banda Aceh Tahun 2017", Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, vol. 3 no.3, 2018, hlm. 4.

⁷ Aat Ruchiat Nugraha, dkk. "Perilaku Komunikasi Politik Pemilih Pemula di Pilkada Kabupaten Bandung", Jurnal Komunikasi, vol. 1 no. 02, 2016, hlm. 103.

tersebut. Padahal kelak mereka juga akan berpartisipasi dalam pemilihan umum sebagai pemilih pemula.

Dalam hal ini peneliti akan memfokuskan penelitiannya terhadap anak putus sekolah di jenjang pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), karena mereka merupakan anak-anak paling mendekati usia hak pilih yang belum berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan maupun sosialisasi politik di jenjang pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas). Untuk daerah penelitian, peneliti memilih untuk melakukan penelitian di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah dikarenakan Jawa Tengah sendiri merupakan provinsi dengan angka putus sekolah yang cukup tinggi, yaitu berada tepat di bawah Jawa Barat dan Jawa Timur dengan rincian data di bawah ini :

Tabel 1.3
Jumlah Anak Putus Sekolah pada Jenjang Pendidikan SMP
di Jawa Tengah dalam 5 tahun terakhir

Tahun Ajaran	Jumlah di Jawa Tengah	Jumlah di Indonesia	Persentase
2018/2019	7.014	85.545	8.2%
2017/2018	4.891	51.190	9.6%
2016/2017	3.673	38.702	9.5%
2015/2016	4.366	51.541	8.5%
2014/2015	6.194	85.000	7.3%

Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan

Rembang, sebagai salah satu bagian dari Provinsi Jawa Tengah, memiliki angka anak putus sekolah yang tinggi di tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama). Peneliti menggunakan data pada tahun ajaran 2015/2016 dikarenakan anak SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang mengalami putus sekolah di tahun tersebut baru memasuki usia pilih dan terdaftar sebagai

pemilih pemula yang dapat memakai hak pilihnya dalam pemilu pada 17 April 2019 yang lalu. Berikut adalah data mengenai anak putus sekolah di Kabupaten Rembang :

Tabel 1.4
Angka Anak Putus Sekolah pada Jenjang Pendidikan SMP
di Kabupaten Rembang

Tahun	Persentase di Kabupaten Rembang	Persentase di Provinsi Jawa Tengah
2015	8.02%	7.42%
2016	5.80%	4.09%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Berdasar pada data tersebut, penulis dapat mengetahui bahwa anak putus sekolah pada tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) di Kabupaten Rembang pada tahun 2015 dan 2016, berada di atas rata-rata anak yang mengalami putus sekolah di Provinsi Jawa Tengah. Ini menjadi bukti bahwa Rembang adalah satu di antara Kabupaten/Kota dengan angka anak putus sekolah yang tinggi.

Pada dasarnya, terdapat ruang-ruang tempat yang digunakan para pemilih pemula untuk belajar politik. Ruang-ruang tersebut biasanya berada cukup dekat dengan ruang yang dirasa dapat memberi rasa nyaman di dalam diri mereka masing-masing. Penjelasan mengenai ruang-ruang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ruang keluarga

Lingkungan keluarga biasanya menjadi tempat pertama kali untuk memulai pelajaran mengenai cara berdemokrasi. Peranan yang sangat penting dipegang oleh keluarga dalam mempengaruhi cara pandang

mengenai kompleksitas kehidupan di sekitarnya, termasuk pendidikan politik. Keluarga juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi secara emosional sehingga dapat membentuk perilaku memilih mereka.

2. Ruang pertemanan (pengaruh teman sebaya)

Salah satu faktor yang patut dipertimbangkan adalah pengaruh dari hubungan pertemanan, dikarenakan faktor eksternal ini memberikan pengaruh terhadap informasi yang diterima seseorang. Dipercaya bahwa teman sebaya dapat mempengaruhi persepsi dan tindakan seseorang baik secara positif maupun negatif, sehingga perilaku politik seseorang berpotensi cenderung sejalan dengan perilaku politik teman sebayanya.

3. Ruang media massa

Di era saat ini, berbagai jenis media massa, khususnya TV, dapat menjadi sumber bagi para masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai politik yang efektif dan efisien. Pemilih pemula atau remaja dapat meluangkan banyak waktu di dalam setiap harinya hanya untuk menonton TV, meskipun program yang mereka tonton tidak terus-menerus memiliki kaitan dengan politik. Hal inipun tetap dapat mempengaruhi perilaku memilih para remaja ini.⁸

Meskipun pemilih pemula ini juga termasuk ke dalam kategori pemilih dalam pemilu pada umumnya, namun masih terdapat perbedaan antara mereka dengan pemilih yang lain, yaitu mengenai pengalaman politiknya dalam proses pemungutan suara. Bagi pemilih pemula, sandaran prioritas

⁸ Indar Melani, *“Perilaku Pemilih Pemula di Kecamatan Duampanua pada Pemilu pada Kabupaten Pinrang Tahun 2013”*, skripsi, 2014, hlm. 12.

yang mereka gunakan dalam membuat pilihan biasanya memiliki kecenderungan ke arah labil atau dapat dikatakan mudah berganti mengikuti keberagaman informasi dan pengaruh orang-orang di sekitar mereka.⁹

Studi tentang perilaku pemilih menggunakan tiga model pendekatan guna menganalisis perilaku pemilih tersebut. Kecenderungan pilihan seseorang dapat diketahui dan dijelaskan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ini. Ketiga pendekatan tersebut yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional.¹⁰ Ketiga pendekatan tersebut dapat menjadi dasar bagi para pemilih pemula untuk menentukan tindakan politiknya sehingga alasan mereka memilih dan arah ke mana mereka memilih dapat dijelaskan melalui pendekatan ini. Berdasarkan pada fakta-fakta empiris beserta aspek-aspek teoritis di atas, kecenderungan perilaku memilih dari para pemilih pemula untuk menentukan bagaimana mereka memilih sangatlah menarik untuk dicermati. Selain itu, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku mereka dalam menentukan pilihannya juga sangat penting, terutama pada pemilihan umum 17 April 2019 yang lalu di Kabupaten Rembang. Melalui penjelasan di atas, maka peneliti merasa memiliki ketertarikan guna melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul **“Perilaku Memilih Pemilih Pemula Putus Sekolah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Rembang (Studi pada Jenjang Pendidikan SMP)”**.

⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

¹⁰ Khairunnisa, *“Partisipasi dan Perilaku Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Presiden 2014 (Studi pada Siswa Lembaga Pendidikan Non-Formal BTA 45 Tebet, Jakarta Selatan)”*, skripsi, 2017, hlm. 21.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana perilaku memilih pemilih pemula putus sekolah dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Rembang pada studi di jenjang pendidikan SMP?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku memilih pemilih pemula putus sekolah dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Rembang dengan fokus pada jenjang pendidikan SMP.

1.4 Kegunaan penelitian

Sementara itu, peneliti mengharapkan penelitian ini memiliki kegunaan dalam hal berikut :

1.4.1 Kegunaan teoritis

Peneliti mengharapkan dengan penelitian ini pembaca dapat menambah dan memperluas pengetahuannya mengenai perilaku politik di Indonesia terutama perilaku pemilih pemula.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Peneliti juga mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi, referensi, dan juga sebagai acuan bagi yang membutuhkan, serta memiliki kegunaan dalam memberikan sumbangan pemikiran untuk penelitian-penelitian mendatang kepada para akademika.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini sebagai bahan perbandingan dan kajian bagi peneliti. Penelitian-penelitian tersebut juga memiliki tujuan yang sejalan dengan penelitian ini yaitu guna mencari tahu tentang perilaku pemilih dalam pemilihan umum di Indonesia, khususnya terhadap pemilih pemula, serta apa yang mempengaruhi mereka dalam menentukan pilihannya tersebut. Dalam penelitian terdahulu tersebut ditemukan hasil yang beragam yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini :

Tabel 1.5
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun Penelitian)	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1.	Renciansyah (2015)	Perilaku Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilih Pemula di Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Anambas Tahun 2014)	Para pemilih pemula di daerah ini memberikan suara mereka dengan mengikuti anggota keluarga mereka. Mereka pun merasa bahwa pilihan keluarganya tersebut adalah pilihan yang terbaik. Pemilih jenis ini biasa disebut pemilih ikut-ikutan

			karena memprioritaskan pilihan anggota kelompoknya, terutama keluarga.
2.	Indar Melani (2014)	Perilaku Pemilih Pemula di Kecamatan Duampua dalam Pilkada Kabupaten Pinrang 2013	Para pemilih pemula di Kecamatan Duampua ini, mereka memutuskan pilihannya dengan dipengaruhi oleh latar belakang lingkungan sosialnya. Di mana keluarga memiliki pengaruh yang besar terhadap pilihan kandidat pemilih pemula.
3.	Fitra Endi Fernanda (2016)	Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Pilkada Serentak di Desa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur tahun 2016	Persepsi pemilih pemula terhadap pemilihan di Desa Way Mili adalah mereka kurang memahami teori, konsep, dan maksud dari dilaksanakannya proses pilkada serentak ini, di mana kegiatan ini dilakukan pemerintah sebagai usaha untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya pengetahuan masyarakat, khususnya para remaja yang merupakan pemilih pemula karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah. Padahal Pengetahuan ini sangatlah penting bagi mereka untuk memutuskan arah mana yang akan diambil dalam memilih.

4.	Khairunnisa (2017)	Partisipasi dan Perilaku Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Presiden 2014 (Studi pada Siswa Lembaga Pendidikan Non-Formal Bta 45 Tebet, Jakarta Selatan)	Sebagian besar data dari penelitian ini menunjukkan bahwa para pemilih cenderung mengarah ke pilihan rasional. Faktor utama yang mempengaruhi pilihan ini adalah dikarenakan adanya dukungan dari para orang tua siswa yang memberikan kebebasan memilih kepada anak-anaknya. Di samping itu, siswa dapat dikatakan sangat antusias mengikuti Pilpres 2014 ini, mengingat pemilu kali ini adalah yang pertama bagi mereka. Peneliti juga melihat bahwa media sosial memegang peran yang amat penting untuk membantu para pemilih pemula dalam mencari informasi yang dibutuhkan terkait dengan para kandidat dalam pemilihan kali ini.
5.	Totok Wahyu Abadi dan Ridlaty Ayu Oktaviana Putri (2016)	Media dan Perilaku Pemilih Pemula pada Pilihan Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Sidoarjo	Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Sidoarjo, ditemukan bahwa sosok presiden yang diidam-idamkan para pemilih pemula adalah calon yang dekat dengan rakyat, memprioritaskan kepentingan masyarakat, murah hati, taat beragama, berprestasi, memiliki kesabaran, dikenal banyak orang,

			<p>dan cerdas. Selain itu, ditemukan bahwa adanya kegiatan sosialisasi dan penggunaan media secara bersamaan berdampak signifikan terhadap perilaku para pemilih pemula di Pilpres 2014. Secara khusus, penggunaan media merupakan faktor yang memiliki pengaruh terbesar dalam perilaku pemilih pemula, dengan persentase sebesar 80,4%. Sementara itu, pengaruh sosialisasi terhadap perilaku pemilih adalah sebesar 11,4%.</p>
--	--	--	---

Pembeda dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian di atas yaitu penelitian ini memiliki fokus pada pelajar di jenjang pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang mengalami putus sekolah sebagai pemilih pemula yang memilih untuk pertama kalinya dalam pemilihan umum 2019 di Kabupaten Rembang di mana pemilihan umum ini merupakan pemilihan umum yang memiliki tujuan guna memilih kandidat presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif, yang mana penyelenggaraannya dilaksanakan dengan bersamaan untuk pertama kalinya di Indonesia. Penelitian ini akan mencari tahu secara lebih rinci mengenai bagaimana perilaku

memilih mereka tanpa adanya pengetahuan tentang pemilihan umum maupun pendidikan politik.

1.5.2 Kerangka Teori

Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1.5.2.1 Pemilihan Umum

Pemilu dapat dikatakan menjadi syarat minimal dari negara demokrasi. Pelaksanaan pemilihan yang *fair* dan *periodik* merupakan salah satu karakteristik dari berjalannya sistem demokrasi.¹¹ Selain itu, terdapat syarat lain sebagai berikut :

1. Pemilihan umum harus menjamin kerahasiaan dalam proses pemungutan suaranya, serta menjamin adanya kejujuran dalam proses penghitungan suara.
2. Partai-partai politik dengan sistem kepartaian kompetitif yang mengikuti pemilihan umum harus bersaing secara sehat satu sama lain.
3. Bagi negara dengan sistem pemungutan suara langsung, hasil dari proses pemungutan suaranya digunakan untuk menetapkan pemimpin negara tersebut. Sedangkan bagi negara dengan prinsip demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, hasilnya

¹¹ Raoda Nur, dkk, “Perilaku Politik Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden 2014 di Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, vol. 5 no. 1, 2015, hlm. 92.

digunakan untuk menentukan jumlah anggota dan komposisi dari lembaga perwakilan negaranya.¹²

Pemilu juga menjadi bentuk lain dari upaya pemenuhan hak asasi masyarakat dalam bidang politik.¹³ Pemilu ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kedaulatan warga, karena seperti yang kita ketahui, tidak memungkinkan bagi seluruh warga negara untuk menjalankan pemerintahan secara langsung.¹⁴ Hal ini sejalan dengan yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut :

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemilihan umum juga merupakan wadah bagi seseorang guna terlibat dalam kontrak sosial dengan para pemilih (masyarakat) yang telah mempunyai hak pilihnya. Berbagai rangkaian kegiatan politik pun dapat dilaksanakan sebelumnya, seperti melakukan kampanye, membuat iklan politik melalui berbagai jenis media, yaitu media cetak, audio (radio), maupun audio-visual (televisi) serta media lain seperti spanduk, selebaran, juga melalui komunikasi antar individu

¹² Antonius P. Sitepu, *System Politik Indonesia*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2006), hlm. 138.

¹³ Syarial Syarbaini, dkk, *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 141.

¹⁴ Fitra Endi Fernanda, *Op. Cit.*, hlm. 32.

dalam bentuk tatap muka atau *lobbying* yang berupa penyampaian pesan dari kandidat untuk meyakinkan para pemilih agar mereka dapat memutuskan calon pilihan mereka untuk mewakili mereka di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif.¹⁵ Selain itu, pemilu ini juga menjadi wadah bagi para aktor politik untuk berkompetisi (berkontestasi) untuk memperoleh kekuatan dari masyarakat dan meliberalisasi hak mereka.¹⁶

Pemilihan umum didasari oleh 6 asas, yang akan dijelaskan secara lebih rinci di bawah ini :

a. Langsung

Para pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung

b. Umum

Seluruh masyarakat dengan kriteria yang sudah terpenuhi mempunyai hak untuk ikut serta dalam kegiatan memilih

c. Bebas

Setiap warganegara memiliki kebebasan untuk menentukan siapa yang akan mereka pilih tanpa mendapatkan tekanan dan paksaan dari siapapun

d. Rahasia

Terdapat jaminan bahwa pihak manapun tidak akan mengetahui pilihan dari para pemilih dengan cara apapun itu

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 33.

¹⁶ Antonius P. Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 177.

e. Jujur

Saat penyelenggaraan pemilihan umum, seluruh pihak dituntut untuk bertindak secara jujur sesuai dengan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah penyelenggara pemilu, pemerintah, parpol kontestan pemilu, pengawas dan pemantau pelaksanaan pemilu, pemilih, dan pihak-pihak lain yang terlibat secara tidak langsung

f. Adil

Dalam kegiatan pemilihan, seluruh pihak yang terlibat mendapat perlakuan setara tanpa adanya ketimpangan dan kecurangan dari pihak tertentu.¹⁷

1.5.2.2 Pemilih Pemula

Pemilih didefinisikan sebagai pihak yang dapat dipengaruhi dan diberi keyakinan yang kuat dari para peserta pemilu agar mereka mendapat dukungan dan suara dari para pemilih tersebut.¹⁸ Sedangkan pemilih pemula sendiri merupakan seorang WNI dengan usia 17 tahun atau lebih, atau telah menikah, ataupun mereka yang merupakan pensiunan anggota TNI/Polri di mana sebelumnya mereka belum pernah berada dalam daftar pemilih karena ketentuan undang-undang tentang pemilihan umum.

Mayoritas pemilih pemula biasanya berusia sekitar 17-21 tahun, kecuali yang sudah menikah serta mereka yang merupakan pensiunan

¹⁷ Sarundajang, *Pilkada Langsung: Problematika dan Prospek*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2013), hlm. 8.

¹⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2003), hlm. 144.

anggota TNI/Polri. Secara umum, para pemilih pemula ini terdiri dari para pelajar, mahasiswa, pekerja muda, dan pensiunan TNI/Polri. Para pemilih pemula umumnya memiliki perbedaan karakteristik jika dibandingkan dengan pemilih lainnya yang telah memberikan suaranya pada pemilu sebelumnya, yaitu :

- a. Belum pernah memberikan suaranya di TPS
- b. Belum mempunyai pengalaman dalam proses pemilihan
- c. Mempunyai semangat/antusiasme yang besar
- d. Rasa ingin tahunya sangat tinggi
- e. Kurang rasional
- f. Menjadi incaran para kontestan dalam pemilihan umum, dikarenakan memiliki jumlah besar.¹⁹

Pemilih pemula adalah bagian dari pemilih secara umum dengan peranan yang tidak kecil untuk kemajuan pemerintahan Indonesia dan tidak boleh dianggap remeh atau disepelekan. Potensi pemilih pemula pada setiap pemilu sangatlah besar. Di tingkat nasional, jumlah pemilih pemula di setiap pemilu diperkirakan mencapai 20% dari keseluruhan jumlah pemilih, hal ini menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara parpol atau kandidat dalam pemilu.²⁰

¹⁹ Wisnu Dani Prasetyo, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2019 di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta”, *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, vol. 1 no. 1, 2019, hlm. 96.

²⁰ Anshary AZ, dkk, *Modul 1: Pemilu untuk Pemula*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2010), hlm. 48.

1.5.2.3 Perilaku Politik

Perilaku politik adalah studi mengenai perilaku seorang manusia, khususnya terhadap aktor politik, pemilih, dan politisi. Dikarenakan dalam berpolitik seseorang diwajibkan untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan ide-ide konseptual dalam ilmu politik, maka perilaku politik ini dapat dianggap menjadi suatu kebutuhan dalam politik.²¹ Gambaran tertentu mengenai interaksi yang terjadi di antara tindakan politik warga negara dan proses politiknya dalam kehidupan berdemokrasi juga dijelaskan dalam perilaku politik.²² Dengan demikian, perilaku politik merupakan perilaku yang berkaitan dalam kegiatan pembuatan, pelaksanaan, serta penegakan keputusan politik berupa hasil dari adanya hubungan timbal balik di antara pemerintah dengan masyarakat, serta antar kelompok dan individu dalam masyarakat.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perilaku politik berkaitan dengan kegiatan pembuatan, pelaksanaan, serta penegakan keputusan politik. Tindakan dalam kegiatan ini, pada terbagi menjadi dua jenis, yaitu dalam fungsi pemerintahan dan fungsi politik yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi, fungsi pemerintah dan juga fungsi politik pada umumnya dilakukan oleh struktur berbeda, yaitu supra struktur politik untuk fungsi politik pemerintahan dan infra struktur politik untuk fungsi politik

²¹ Fatahullah Jurdi, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 134.

²² Khairunnisa, *Op. Cit.*, hlm. 20.

masyarakat.²³ Segala tindakan tersebut, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat memiliki kaitan untuk mencapai tujuan masyarakat serta dengan kebijakan-kebijakan dan sistem kekuasaan yang memiliki kemungkinan untuk digunakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa perilaku politik lebih mengarah pada konsensus guna mewujudkan tujuan dari masyarakat dan pemerintah. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa perilaku politik tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki ketertarikan terhadap hal lainnya.²⁴

Terdapat berbagai jenis perilaku di samping perilaku politik, yaitu perilaku keagamaan, perilaku organisasi, perilaku ekonomi, perilaku budaya, dan lain sebagainya.²⁵ Reaksi-reaksi internal seperti sikap, keyakinan, orientasi, persepsi, serta tindakan nyata tertentu layaknya *voting*, *lobby*, protes dan sebagainya juga terdapat di dalam perilaku politik. Segala hal yang tergolong dalam kejadian masa lampau yang merupakan suatu keberlanjutan dapat mempengaruhi sikap maupun perilaku seseorang. Peristiwa atau kejadian yang dimaksud di sini dapat terjadi dalam beberapa bentuk, misalnya berupa janji-janji politik yang telah diungkapkan namun tidak pernah ditepati oleh calon pemimpin kepada masyarakat, adanya ketidakstabilan dalam politik di lingkungan individual ataupun dalam bentuk kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat. Hal-hal

²³ Raoda Nur, dkk, *Loc. Cit.*

²⁴ Sudijono Sastroatmojo, *Perilaku Politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), hlm. 56.

²⁵ Indar Melani, *Op.Cit.*, hlm. 17.

inilah yang nantinya dapat mempengaruhi perilaku dari masyarakat dalam bidang politik.²⁶

1.5.2.4 Perilaku Pemilih

Salah satu bentuk dari perilaku politik adalah perilaku pemilih yang dapat dilihat dalam proses pemilihan umum. Perilaku ini merupakan langkah dari setiap individu dalam rangka memutuskan keikutsertaannya atau dapat dikatakan untuk menentukan apakah ia ingin memilih atau tidak memilih (*to vote or to not vote*) dalam kegiatan pemilu.²⁷

Perilaku dan interaksi antar individu dalam pemilu memiliki kaitan yang sangat erat dengan perilaku pemilih, khususnya mengenai ketertarikan politiknya dengan partai atau kandidat politik yang mereka sukai atau yang dirasa paling cocok, yang akan mereka pilih di masa mendatang. Kecocokan masyarakat dalam menentukan dan mengubah sikap serta perilakunya dalam berbagai bidang harus disesuaikan dengan kondisi dan dinamika kehidupan masyarakat yang sudah mapan sebelumnya.²⁸

Kegiatan pemilihan tentunya tidak asing lagi dengan istilah ideologi. Ideologi ini biasanya dibawa oleh masing-masing kontestan dan akan saling berinteraksi dalam periode kampanye. Pada saat inilah

²⁶ Novella Putriasafa, “*Karakteristik Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2015 (Studi di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung)*”, skripsi, 2016, hlm. 11.

²⁷ Ramlan Surbakti, *Op.Cit.*, hlm. 75.

²⁸ Suyono, “*Perilaku Memilih Pemilih Pemula pada Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 di Kecamatan Taman*”, Jurnal FKIP Unipa Surabaya, vol. 15 no. 27, 2019, hlm. 94.

ideologi-ideologi tersebut akan menjadi kelompok-kelompok tertentu, di mana nantinya akan dipilih oleh masyarakat yang merasa memiliki kesamaan ideologi dengan para kontestan. Pada saat yang sama, masyarakat akan meninggalkan ideologi yang dirasa tidak sesuai atau yang berlawanan dengan ideologi yang mereka anut.²⁹

Dalam kegiatan analisis perilaku pemilih, terdapat tiga pendekatan yang dapat dipergunakan di dalamnya, yaitu :

1. Pendekatan Sosiologis

Dasar dari pendekatan ini terdapat pada penjelasan mengenai karakteristik-karakteristik sosial layaknya pendidikan, pekerjaan, dan kelompok sosial layaknya agama, wilayah, usia, jenis kelamin yang memiliki signifikansi pengaruh dalam penentuan perilaku dari para pemilih.³⁰ Hal ini dikarenakan para pemilih akan cenderung memilih seseorang maupun suatu partai yang memiliki kesamaan latar belakang sosiologis dengan yang mereka miliki. Kesamaan latar belakang inilah yang akan mendorong mereka untuk memilih.

2. Pendekatan Psikologis

Konsep sosialisasi dan sikap digunakan dan dikembangkan dalam pendekatan psikologis guna menjelaskan perilaku para pemilih. Berdasarkan pendekatan ini, dapat diketahui bahwa adanya kecukupan informasi yang dimiliki, serta memiliki keyakinan bahwa pilihan mereka berarti dan dapat membantu memperbaiki

²⁹ Asfar Muhammad, *Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004*, (Jakarta: Pustaka Eureka, 2006), hlm. 137.

³⁰ *Loc. Cit.*

keadaan, bukanlah alasan para pemilih mengikuti pemilu. Namun, dalam pendekatan ini, kedekatan secara emosional atau perasaan memiliki terhadap partai atau kandidat memberikan pengaruh lebih daripada faktor-faktor tersebut.³¹ Hal ini dibentuk oleh proses sosialisasi yang panjang, yang menciptakan koneksi emosional antara pemilih dengan kandidat atau partai bersangkutan yang pada akhirnya tanpa sadar membentuk suatu identifikasi.³² Secara umum, pendekatan psikologis terhadap perilaku pemilih ini melingkupi beberapa hal diantaranya, proses identifikasi dari seseorang terhadap parpol atau identitas suatu partai, pendapat mengenai isu-isu maupun kebijakan publik tertentu yang masih memiliki keterkaitan, serta pendapat mengenai kualitas pribadi dari kandidat atau tokoh-tokoh yang berada dalam suatu partai yang mencalonkan dirinya dalam kegiatan pemilu.³³

3. Pendekatan Pilihan Rasional

Pendekatan ini berasal dari sudut pandang ekonomi, di mana keuntungan yang didapat oleh pemilih dalam proses partisipasi maupun pemungutan suara lebih diutamakan dalam hal ini. Sebagaimana yang terkandung dalam prinsip ekonomi, membelanjakan modal seminimal mungkin guna memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Dengan kata lain, pemilih tidak

³¹ Khairunnisa, *Op. Cit.*, hlm. 23.

³² Adman Nursal, *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 59.

³³ Saiful Mujani, dkk, *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Mizan, 2012), hlm. 26.

masalah terhadap konsep politik yang diberikan oleh parpol atau kandidat, melainkan mengandalkan keuntungan yang didapat saat memilih calon tersebut.³⁴ Pendekatan ini digunakan pemilih untuk menentukan siapa yang akan mereka pilih, juga untuk menentukan apakah mereka akan memilih atau tidak.³⁵

1.6 Operasionalisasi Konsep

Sebelum membahas metode penelitian, terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai istilah-istilah kunci dari konsep yang digunakan untuk mempertegas, memberikan arah, dan menghindari kesalahpahaman, di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Perilaku Pemilih Pemula

Suatu tindakan dari pemilih pemula dalam pemilihan umum, meliputi hal-hal yang melatarbelakangi pilihan mereka, seperti :

1. Memiliki pengetahuan tentang pemilu
2. Memiliki pengetahuan tentang calon dan kandidat
3. Memiliki kelompok sosial
4. Memiliki calon yang akan dipilih
5. Kesiediaan hadir di TPS
6. Memilih/mencoblos

³⁴ Khairunnisa, *Op. Cit.*, hlm. 25.

³⁵ Raoda Nur, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 95.

b. Pemilihan Umum

Kegiatan pemilihan untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif, yang akan menjadi wakil rakyat dalam pemerintahan. Dalam pemilu yang diselenggarakan pada ada 17 April 2019 yang lalu, pelaksanaannya ditujukan untuk memilih anggota legislatif, serta presiden dan wakil presiden dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1.7 Metode penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang memiliki tujuan guna memahami fenomena eksperiensial subjek penelitian, layaknya persepsi, motivasi, perilaku, dan sebagainya secara menyeluruh menggunakan pendeskripsian dengan bentuk kata-kata dan bahasa, dengan menggunakan bermacam metode ilmiah.³⁶ Semua fakta mengenai subjek maupun objek yang ditemukan oleh peneliti selama melaksanakan penelitian di lapangan akan dideskripsikan secara lengkap dan sejelas mungkin.

³⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 45.

1.7.2 Situs Penelitian

Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan oleh peneliti di Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Peneliti melakukan penelitiannya di Rembang dengan alasan berdasarkan data yang telah dikemukakan sebelumnya, di mana Kabupaten Rembang adalah satu di antara Kabupaten/Kota yang memiliki persentase angka putus sekolah siswa di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tinggi, yaitu di atas persentase angka anak putus sekolah di jenjang tersebut yang ada di Provinsi Jawa Tengah, sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana perilaku pemilih pemula yang ada di Kabupaten Rembang ini.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini merupakan anak-anak di Kabupaten Rembang yang mengalami putus sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun ajaran 2015/2016 yang mengikuti pemilihan umum pada tanggal 17 April 2019.

1.7.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan data berupa kata-kata dan kalimat, dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

Data tersebut meliputi :

a. Data primer

Adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari proses wawancara secara langsung dengan informan atau narasumber yang direkam dan dicatat oleh peneliti.

b. Data sekunder

Adalah data yang diterima dari pihak ketiga berupa catatan dan laporan. Data ini diambil untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai masalah yang diteliti.

1.7.5 Teknik pengumpulan data

Adapun teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Wawancara

Data-data valid dan informasi terkait penelitian dikumpulkan dengan teknik wawancara. Data ini diterima atau didapat dari sesi tanya jawab secara langsung dengan informan yang bersangkutan.

b. Dokumentasi

Teknik ini dipergunakan dalam proses pencarian data yang diperlukan dalam penelitian melalui dokumen, arsip, buku literatur, surat kabar, jurnal, internet, dan lain-lain yang masih relevan terhadap topik pembahasan dalam penelitian.

1.7.6 Analisis dan Interpretasi Data

Peneliti mempergunakan teknik analisis interaktif, seperti yang disarankan oleh Miles dan Huberman, di bawah ini :

1. Pengumpulan Data

Merupakan proses untuk mendapatkan data yang akan digunakan oleh peneliti sebelum memulai proses analisis data.

2. Reduksi Data

Adalah kegiatan pemilihan dan untuk menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan melalui proses wawancara dan lain sebagainya.

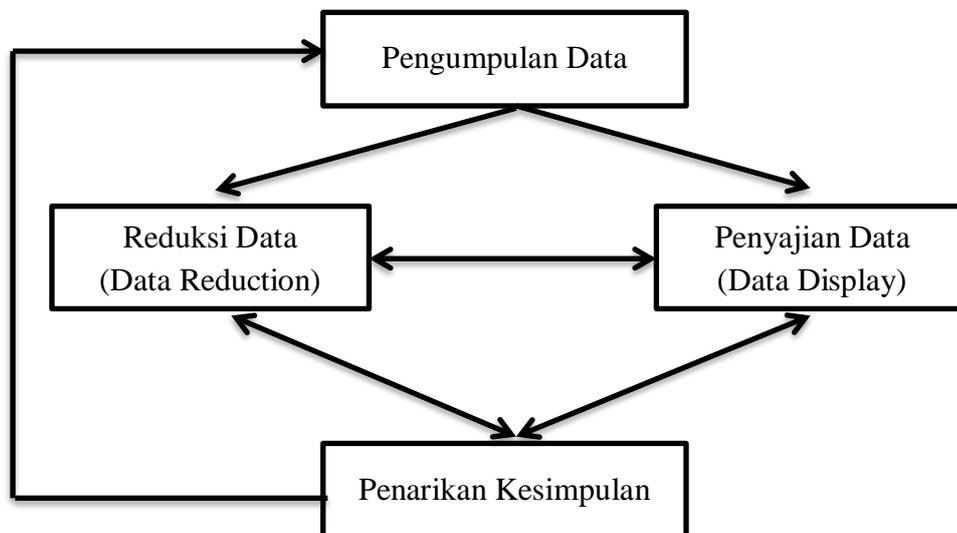
3. Penyajian Data

Proses pengaturan data dari lapangan agar mudah ditelaah dan dianalisis.

4. Penarikan Kesimpulan

Adalah proses final atau akhir dari penelitian ini.³⁷

Gambar 1.1
Teknik Analisis Interaktif



Bagan mengenai teknik analisis data tersebut menunjukkan bahwa proses mengumpulkan data dan proses menganalisis data dapat

³⁷ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara, 2007), hlm. 104.

dilaksanakan bersama-sama. Proses-proses analisis yang dimaksud mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1.7.7 Kualitas Data (goodness criteria)

Kriteria kredibilitas digunakan oleh peneliti untuk menentukan kualitas data dalam penelitian ini. Untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh benar dan pasti, maka peneliti memastikan keabsahan data penelitian dengan mencantumkan bahan referensi berupa foto dan rekaman wawancara.